

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PENELITIAN DAN KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REKORD DAN PERSILAPAN TAHUN 2016



sumber foto: <http://sinarharapan.net/>

SEMNAS SOSEK 2016

Jakarta, 24 Oktober 2016



PPSEKP



IMFISERN



P2KK-LIPI

ISBN: 978-602-0804-47-7

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL RISET DAN KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KEAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016

Jakarta, 24 Oktober 2016

Penyunting :

Catur Pramono Adi, M.Si
Andrian Ramadhan, MT
Tenny Apriliani, M.Si
Hertria Maharani Putri, MBA

Tim Ilmiah:

Dr. Tajerin
Prof. (Ris). Zahri Nasution
Prof. (Ris). Sonny Koeshendrajana
Dr. Agus Heri Purnomo
Drs. Mashuri Imron, MA
Drs. Ary Wahyono, M. Si

Desain dan Tata Letak :

Ilham Ferbiansyah

Kerjasama:



Pusat Penelitian Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan



Indonesian Marine Fisheries Socio-Economics
Research Network



Pusat Penelitian Kemasayrakan dan Kebudayaan
LIPI

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang Kp Lt. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. : (021) 6471 1583 FAX.: 64700924
Laman: <http://bbpse.litbang.kkp.go.id>-E-MAIL: bbrsosek@yahoo.com

sumber foto: <http://sinarharapan.net/>

8	ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN PULAU-PULAU KECIL MELALUI DIVERSIFIKASI USAHA UNTUK Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Kasus Keluarga Nelayan di Pulau Bahuluang Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan) Oleh: <i>Mardiana Ethrawaty Fachry</i>	253
9	PROFIL USAHA PERIKANAN Tangkap di Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara Oleh: <i>Rizky Muhartono dan Muhadzir</i>	265
10	PENGELOLAAN SISTEM TATA NIAGA GARAM SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN INVESTASI USAHA SKALA KECIL KOMUNITAS PESISIR KABUPATEN LOMBOK TIMUR Oleh: <i>Sitti Hilyana</i>	275
11	MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI KAWASAN BERBASIS TEKNOLOGI ADAPTIF LOKASI PERIKANAN BUDIDAYA LELE DAN LOBSTER DI KABUPATEN SUKABUMI Oleh: <i>Tenny Apriliani, Christina Yuliati dan Armen Zulham</i>	285
12	INOVASI TEKNOLOGI TERAPAN UNTUK INDUSTRI PAKAN IKAN MANDIRI Oleh: <i>Budi Wardono dan Rikrik Rahadian</i>	297
13	ANALISIS USAHA IKAN GABUS (<i>Channa Striata</i>) SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN USAHA FILLET DI KAB. MERAUKE Oleh: <i>Tikkyrino Kurniawan dan Diah Iksari</i>	309
14	EFEKTIVITAS SEGMENTASI UNTUK MENINGKATKAN PASAR EKSPOR TUNA INDONESIA Oleh: <i>Risna Yusuf dan Freshty Yulia Arthatiani</i>	319
15	DAMPAK PERGESERAN MUSIM HUJAN TERHADAP KEGIATAN PETAMBAK GARAM DI DESA KALIBUNTU, PROBOLINGGO- JAWA TIMUR DAN STRATEGI ADAPTASINYA Oleh: <i>Ratna Indrawasih</i>	331
16	PREDIKSI PERTUMBUHAN SEKTOR PERIKANAN: <i>ESTIMATION CURVE</i> Oleh: <i>Tikkyrino Kurniawan dan Mira</i>	347
17	ANALISIS STRUKTUR BIAYA DAN EFISIENSI USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KEPULAUAN NATUNA Oleh: <i>Yayan Hikmayani</i>	355
REGULASI KEBIJAKAN DAN HUKUM KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEAMANAN PANGAN PADA PRODUK OLAHAN HASIL PERIKANAN Oleh: <i>Eko Waluyo dan Bayu Kusuma</i>	367
2	PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI PESISIR PANTAI CLUNGUP DUSUN SENDANG BIRU DESA TAMBAKREJO KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR Oleh: <i>Erlinda Indrayani, Nuddin Harahab dan Edi Susilo</i>	375
3	KEBIJAKAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PALABUHARATU Oleh: <i>Permana Ari Soejarwo dan Rudhy Akhwady</i>	383
4	PENGELOLAAN SIPUT GONGGONG DI PERAIRAN P. BINTAN MENUJU PEMANFAATAN YANG BERKELANJUTAN Oleh: <i>Sudiyono</i>	397
5	RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH (KKLD) DESA OLELE KECAMATAN KABILA BONE KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO Oleh: <i>Yuniarti Koniyo</i>	415

RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH (KKLD) DESA OLELE KECAMATAN KABILA BONE KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO

Yuniarti Koniyo

(Dosen pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNG)

Email : lindakoniyo@yahoo.co.id

Tujuan umum kegiatan penyusunan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Desa Olele Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo ini adalah menyusun konsep, arahan rekomendasi pola pengelolaan kawasan konservasi laut daerah secara jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek untuk konservasi habitat, proses-proses ekologi, dan perlindungan nilai sumberdaya sehingga kegiatan perikanan, pariwisata dan penelitian, pendidikan dapat dilaksanakan secara sinergis dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode survey dan observasi langsung, dilakukan dengan beberapa pendekatan dan tahapan, yaitu pengumpulan data dan informasi (sekunder dan primer), evaluasi dan kajian terhadap data dan informasi, pendekatan partisipatif, serta dianalisis secara deskriptif. Hasil pembahasan dinyatakan bahwa Isu-isu dalam pengelolaan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) Desa Olele secara umum diakibatkan oleh 2 faktor yakni berasal dari aktifitas manusia dan pengaruh faktor alam. Berdasarkan skala prioritas isu dalam proses pengelolaan kawasan KKLD yakni kualitas sumberdaya manusia masih rendah, belum tersedianya sarana prasarana pendukung yang memadai, belum terjalinnnya koordinasi yang baik antar instansi terkait, penegakkan hokum masih lemah, mata pencaharian alternative dan pengembangan wisata bahari. Rencana pengelolaan Kawasan konservasi laut daerah (KKLD) Desa Olele dan implementasinya memerlukan strategi utama dan starategi pengembangan yang merupakan turunan strategi utama. Strategi utama dan pengembagnn merupakan formulasi dari keterkaitan solusi permasalahan sehingga telah ditetapkan empat strategi utama yaitu : (1) Pengelolaan wilayah pesisir dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal (2) Pengembangan sumberdaya manusia, (3) pembangunan dan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, (4) Penguatan dan pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di kawasan KKLD. Masing-masing strategi utama ini memiliki turunan-turunan yang menjadi strategi pengembangan.

Kata Kunci : Rencana pengelolaan, KKLD, Desa Olele

Pendahuluan

Kawasan konservasi perairan merupakan bagian dari upaya pengelolaan atau konservasi ekosistem. Kawasan Konservasi Perairan didefinisikan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Pengertian Kawasan Konservasi Perairan menurut UU 45/2009 tentang Perikanan dan PP 60/2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, menyatakan bahwa ada dua hal penting yang menjadi paradigma baru dalam pengelolaan konservasi. Pertama, Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan diatur dengan sistem zonasi. Pembagian zona yang dapat dikembangkan di dalam Kawasan Konservasi Perairan yakni: zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Kedua, dalam hal kewenangan, pengelolaan kawasan konservasi yang selama ini menjadi kewenangan

pemerintah pusat. Berdasarkan undang-undang 27/2007 dan PP 60/2007 serta Permen Men KP no 02/2009, Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola kawasan konservasi di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan mandat UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah terkait pengaturan pengelolaan wilayah laut dan konservasi.

Komitmen membangun kawasan konservasi perairan oleh Pemerintah Indonesia, secara konsisten dibuktikan dengan peran aktif Indonesia dalam inisiasi, kolaborasi dan kerjasama konservasi di tingkat regional dan internasional. Melalui forum internasional pada pertemuan para pihak Convention on Biological Diversity (COP CBD), bulan Maret 2006 di Brasil, pemerintah Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berkomitmen untuk mengembangkan kawasan konservasi perairan seluas 10 juta hektar pada tahun 2010. Komitmen ini ditindaklanjuti dan berlanjut hingga tercapainya 20 juta hektar pada tahun 2020. Upaya konservasi perairan bukan hanya pada target luasan kawasan konservasi, namun secara konsisten berupaya mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif bagi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan pendanaan yang berkelanjutan.

Kawasan konservasi perairan laut dikenal sebagai kawasan konservasi laut (KKL). Dalam pengembangannya, kawasan konservasi perairan di wilayah laut yang dikembangkan oleh pemerintah daerah sering disebut sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Salah satu Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Provinsi Gorontalo adalah Desa Olele Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah adalah proses untuk mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi/lembaga terhadap pembangunan sehari-hari yang berlangsung di dalam kawasan.

Komitmen Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perikanan dan Kelautan dalam usaha pengembangan kawasan konservasi laut daerah adalah telah melaksanakan beberapa tahapan, yakni melakukan kegiatan pemantapan kawasan KKLD dengan legalitas kawasan berupa keputusan Bupati Bone Bolango No. 165 Tahun 2006 tentang Pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah di Desa Olele Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. Usaha lain yaitu telah dilakukan kesepakatan lokal masyarakat Desa Olele mengenai penentuan batas (zonasi) KKLD yakni zona inti 8 Ha, zona penyangga 313 Ha dan rencana penambahan luasan KKLD sampai dengan 2017 seluas 5.407 Ha. Kawasan konservasi yang telah ada sangat diharapkan mampu mendukung perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan kegiatan penyusunan rencana pengelolaannya.

Tujuan Penelitian

Tujuan umum kegiatan penyusunan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Desa Olele Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo ini adalah menyusun konsep, arahan rekomendasi pola pengelolaan kawasan konservasi laut daerah secara jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek untuk konservasi habitat, proses-proses ekologi, dan perlindungan nilai sumberdaya sehingga kegiatan perikanan, pariwisata dan penelitian, pendidikan dapat dilaksanakan secara sinergis dan berkelanjutan.

Manfaat Penelitian

Sasaran pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi laut daerah Desa Olele Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo adalah : tersusunnya konsep, arahan rekomendasi pola perencanaan pengelolaan kawasan konservasi laut daerah secara jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek untuk kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

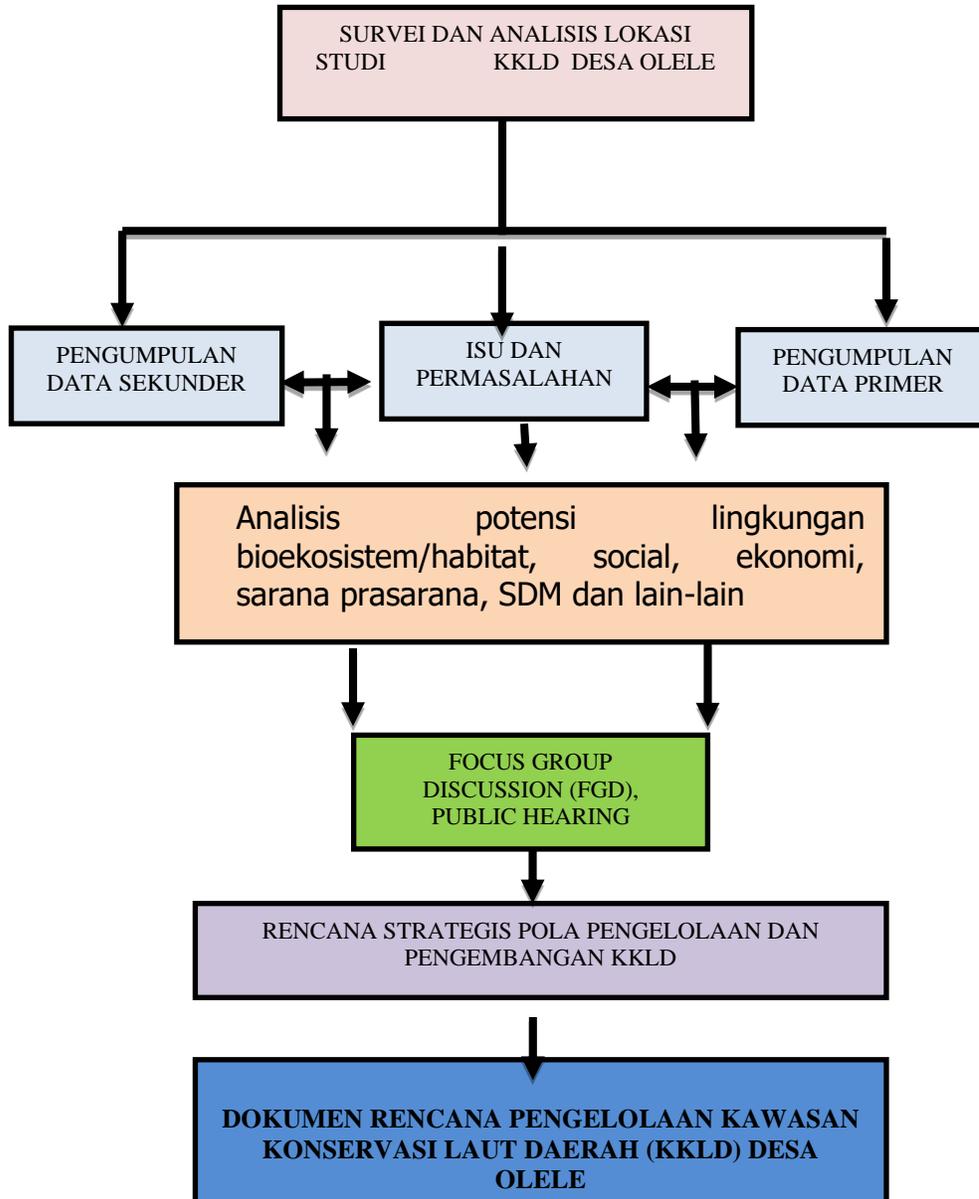
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survey yaitu penelitian yang alat instrument pengumpulan datanya berbentuk kuesioner dan lembar observasi, (Singarimbun dan Effendi, 1995).

Metode pendekatan studi penyusunan manajemen plan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD), dilakukan dengan beberapa pendekatan dan tahapan, yaitu pengumpulan data dan informasi (sekunder dan primer), melakukan evaluasi dan kajian terhadap data dan informasi, pendekatan partisipatif dengan menyelenggarakan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion). Kegiatan *Focus Group Discussion* dilaksanakan dengan metode pendekatan *participatory dan konsultatif*. Metode ini dilakukan untuk mengidentifikasi isu masalah dan strategi pengembangan, yaitu dengan melihat struktur keterkaitan permasalahan yang ada pada tingkat stakeholder, serta untuk melihat hubungan sebab akibat dari permasalahan yang satu dengan permasalahan yang lain. Pendekatan partisipatif dan konsultatif yaitu menekankan pada prinsip keterbukaan, kesetaraan dan kebersamaan bagi semua stakeholder dan dilakukan dengan mengajak sebagian besar masyarakat/stakeholder berbincang dalam

diskusi kelompok terarah. Langkah awal dari metode ini adalah dengan memetakan isu dan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, dan pengumpulan serta kompilasi pendapat stakeholder, menjadi faktor positif atau negatif terhadap penyusunan manajemen plan kawasan konservasi laut daerah.

Secara jelas kerangka pendekatan studi penyusunan manajemen plan kawasan konservasi laut daerah dapat di lihat pada Gambar dibawah ini.



Kerangka Pendekatan studi penyusunan rencana pengelolaan KKLD Desa Olele

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan KKLD Desa Olele

Salah satu tahapan penting yang diperlukan dalam penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) adalah identifikasi berbagai isu dan permasalahan dalam berbagai kegiatan di wilayah tersebut. Isu-isu dalam pengelolaan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) Desa Olele secara umum diakibatkan oleh 2 faktor yakni berasal dari aktifitas manusia dan pengaruh faktor alam.

Berbagai aktifitas manusia yang mengancam keutuhan ekosistem di kawasan KKLD diantaranya adalah penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan kompresor, potas, bom, jangkar yang ditambatkan di karang, serta kerusakan karang akibat aktivitas wisata bahari seperti *diving*, *snorkeling*, berenang dan sebagainya. Selain itu aktivitas penangkapan satwa-satwa yang dilindungi merupakan isu penting juga pada kawasan KKLD. Sedangkan faktor alam yang menyebabkan kerusakan ekosistem di kawasan KKLD adalah kerusakan akibat pengaruh musiman terutama musim barat dan musim timur, predasi yang dilakukan oleh Bulu Seribu (*Acanthaster planci*) serta adanya fenomena perubahan iklim. Peningkatan suhu permukaan air laut yang merupakan salah satu akibat fenomena perubahan iklim akan menimbulkan efek pemucatan pada salah satu sumberdaya alam yakni terumbu karang (*bleaching*), penyakit karang dan gejala asidifikasi yang akan menyebabkan pengeroposan struktur komponen penyusun terumbu karang.

Secara jelas isu dan permasalahan dalam proses pengelolaan kawasan KKLD sebagai berikut :

1. Sumberdaya Manusia

Masalah yang mendasar dan umum banyak ditemui di masyarakat pesisir adalah rendahnya keterampilan dari masyarakat/nelayan yang tinggal di wilayah pesisir. Hal ini disebabkan kurang intensifnya pemerintah daerah mengadakan kegiatan pendidikan yang sifatnya informal seperti pelatihan, diklat, dan kursus tentang pengelolaan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut khususnya pengelolaan kawasan KKLD. Secara keseluruhan intensitas pelaksanaan pendidikan informal masyarakat di wilayah KKLD masih sedikit. Masalah ini penanganannya haruslah menjadi prioritas bagi pemerintah daerah melalui kordinasi dan kerjasama dengan instansi/dinas terkait dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan informal seperti dengan Departemen Sosial, Kimpraswil dan sebagainya.

Kurangnya pusat-pusat pelatihan keterampilan kelautan/balai latihan keterampilan kelautan sangat berpengaruh pada pengelolaan dan pengembangan sumberdaya pesisir dan lautan. Kurangnya evaluasi setiap pelatihan yang diadakan juga sangat berpengaruh pada kualitas pelatihan itu sendiri.

2. Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Isu atau permasalahan utama yang diakibatkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan yakni : pemboman ikan, penggunaan racun ikan, penangkapan ikan dengan listrik, terjadinya sedimentasi dan abrasi Pantai.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengelolaan dan pengembangan di kawasan KKLD baik sebagai daerah perlindungan laut (DPL) ataupun kawasan wisata Bahari sangat kurang. Selain itu lemahnya fasilitas pendukung belum memadai terutama berkaitan dengan sarana/prasarana listrik dan air bersih. Untuk sarana pendukung dalam kegiatan wisata bahari sangat kurang seperti penginapan, restoran, sarana untuk atraksi wisata bahari, fasilitas rekreasi serta toko-toko dan lain-lain

Sarana/prasarana komunikasi sangat diperlukan seiring dengan perkembangan ekonomi wilayah dan tingkat mobilitas penduduknya. Saat ini rasio pelayanan komunikasi yang diselenggarakan masih relatif kecil.

4. Kelembagaan

Permasalahan dalam proses pengelolaan kawasan KKLD di Desa Olele dari segi kelembagaan adalah : kurangnya sosialisasi KKLD, kelembagaan formal pengelola KKLD belum terbentuk , kurangnya penegakan hukum, dan kurangnya pengawasan.

Berdasarkan skala prioritas isu dan permasalahan dalam proses pengelolaan kawasan KKLD Desa Olele dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1. Isu dan permasalahan berdasarkan skala prioritas dalam proses pengelolaan kawasan KKLD

Isu Utama	Prioritas
Kualitas SDM masih rendah	Pertama
Belum tersedianya sarana prasarana pendukung yang memadai	Kedua
Belum terjalinnya koordinasi yang baik antara instansi terkait	Ketiga
Penegakkan hukum masih lemah	Keempat
Mata pencaharian alternatif	Kelima
Pengembangan Wisata Bahari	Keenam

Strategi Pengelolaan KKLD Desa Olele

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam laut yang lestari, maka diperlukan suatu manajemen plan yang berisi tentang berbagai strategi terpadu pengelolaan sumberdaya kelautan. Strategi pengelolaan suatu kawasan ekosistem perairan secara komprehensif diharapkan dapat menyatukan beberapa kebijakan yang ada sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Rencana pengelolaan Kawasan konservasi laut daerah (KKLD) Desa Olele dan implementasinya memerlukan strategi utama dan starategi pengembangan yang merupakan turunan strategi utama. Strategi utama dan pengembagn merupakan formulasi dari keterkaitan solusi permasalahan sehingga telah ditetapkan empat strategi utama yaitu : (1) Pengelolaan wilayah pesisir dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal (2) Pengembangan sumberdaya manusia, (3) pembangunan dan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, (4) Penguatan dan pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di kawasan KKLD. Masing-masing strategi utama ini memiliki turunan-turunan yang menjadi strategi pengembangan.

Agar berbagai srategi dan rencana kegiatan dapat dilaksanakan maka pengelolaan kawasan konservasi laut daerah Desa Olele harus menganut prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

- 1) Adaptif (Pengelolaan yang adaptif terhadap perubahan dan informasi baru untuk memperbaiki kinerja pengelolaan suatu kawasan konservasi)
- 2) Berkelanjutan (Upaya-upaya pemanfaatan dilaksanakan berdasar pada azas keberlanjutan dan ekologis)
- 3) Pendekatan Ekosistem (Pengelolaan ekosistem memfokuskan pada integritas ekosistem dengan mempertimbangkan aspek pemanfaatan)
- 4) Manfaat Ganda (Pengelolaan dengan mengikuti proses untuk alokasi sumberdaya dan pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan dan penetapan kawasan)
- 5) Pengelolaan Bersama (Pengelolaan bersama untuk mengimplementasikan contoh-contoh pengelolaan sumberdaya yang baik).

Rencana Pengelolaan KKLD Desa Olele

1. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Potensi pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah jelas sangat dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yakni tingkat keterampilan dan pendidikannya. Oleh karena itu, maka kebijakan yang seharusnya dirancang untuk meningkatkan relevansi sistem pendidikan terhadap kebutuhan-kebutuhan pembangunan daerah harus melibatkan dua hal pokok secara menyeluruh:

- 1) Perbaiki sistem struktur insentif yang berada di luar sistem pendidikan dalam bentuk penyediaan tempat-tempat, pendidik (guru) dan fasilitas sekolah oleh pemerintah
- 2) Perbaiki terhadap efektivitas dan pemerataan unsur-unsur internal di dalam sistem pendidikan itu sendiri, melalui penyesuaian materi-materi pelajaran, perbaikan struktur pembiayaan oleh pemerintah, perbaikan metode seleksi serta peningkatan kualitas prosedur penilaian agar ijazah tidak terlampaui diutamakan sehingga melebihi kompetensi.

Masyarakat Desa Olele umumnya menggantungkan hidupnya pada hasil perikanan dan pertanian. Jika dilihat dari potensi sumber daya perikanan dan pertanian yang ada memang cukup potensial, tapi belum diolah secara baik sehingga hasil yang diperoleh belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pertanian dan pengetahuan teknik penangkapan ikan atau perikanan yang baik, serta belum dikembangkannya variasi kegiatan usaha sebagai mata pencaharian tambahan. Strategi utama untuk mencapai tujuan pengembangan sumberdaya manusia adalah peningkatan pendidikan baik formal maupun non formal dan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan strategi utama tersebut maka strategi pengembangannya sebagai berikut :

Strategi 1 : Meningkatkan pengetahuan, keterampilan masyarakat nelayan tentang usaha-usaha perikanan

Strategi 2 : Meningkatkan pendapatan masyarakat

Strategi 3 : Meningkatkan pendidikan masyarakat melalui penyediaan fasilitas (sarana dan prasarana) pendidikan

Strategi 4 : Meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Rencana kegiatan peningkatan pendidikan dan taraf hidup masyarakat dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. Strategi pengembangan, rencana kegiatan dan jangka waktu program peningkatan pendidikan dan taraf hidup masyarakat

No	Strategi Pengembangan	Rencana Kegiatan	Jangka Waktu Program		
			Pendek	Menengah	Panjang
1	Meningkatkan pengetahuan, keterampilan masyarakat nelayan tentang usaha-usaha perikanan	1) Melaksanakan berbagai pelatihan teknologi tepat guna dan kursus-kursus dalam peningkatan produksi perikanan	✓	✓	✓
		2) Pendampingan manajemen dan asistensi teknis terhadap usaha-usaha perikanan	✓	✓	-
		3) Pengembangan SDM di bidang pariwisata	✓	-	-
2	Meningkatkan pendapatan masyarakat	1) Mengembangkan berbagai peluang usaha mandiri perikanan dan kelautan	✓	✓	-
		2) Membangun pola kemitraan dengan swasta	✓	-	-
		3) Meningkatkan akses ke sumber-sumber permodalan	✓	✓	-
		Meningkatkan pengetahuan manajemen usaha perikanan			
		4) Menyediakan sistem kredit untuk usaha perikanan melalui lembaga keuangan dan perbankan komersial	✓	✓	✓
		5) Mengembangkan mata pencaharian alternative dan diversifikasi usaha (produksi dan pasca panen)	✓	✓	-
		6) Melakukan Penguatan permodalan nelayan melalui fasilitasi pembentukan kemitraan antara perusahaan pengolah/eksportir dengan kelompok-kelompok nelayan	✓	✓	✓
7) Penjaringan investor untuk pengembangan pariwisata	✓	✓	-		

3	Meningkatkan pendidikan masyarakat	1) Memberikan beasiswa / subsidi untuk peningkatan pendidikan anak nelayan	✓	✓	✓
		2) Membangun pusat-pusat pelatihan keterampilan kelautan/balai latihan keterampilan kelautan untuk pengelolaan dan pengembangan sumberdaya pesisir dan lautan	✓	✓	-
		3) Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan melalui pendirian sekolah kejuruan perikanan, pengadaan laboratorium dan lain-lain	✓	✓	-
4	Meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan	Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat dan pengelola KKLD tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir	✓	✓	-

Strategi pengembangan dan rencana kegiatan tersebut di atas setidaknya dapat menjadi acuan dalam melakukan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di wilayah KKLD. Melihat kompleksitas pembangunan di wilayah pesisir, sudah semestinya pada saat ini adanya suatu perencanaan pembangunan sumberdaya manusia secara terpadu di wilayah pesisir. Perencanaan ini penting dalam rangka memfokuskan sasaran pembangunan yaitu meningkatkan partisipasi secara aktif masyarakat lokal dalam mengelola kawasan KKLD.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal

Pengelolaan wilayah pesisir dan pemanfaatan sumberdaya alam perikanan dan kelautan harus dilakukan secara optimal untuk itu diperlukan strategi utama pengembangan SDA dan Lingkungan yang mampu menjamin pengelolaan secara optimal.

Salah satu strategi utama yang perlu mendapatkan perhatian serius untuk diimplemetasikan adalah : Pengelolaan wilayah pesisir dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal. Sedangkan yang merupakan strategi pengembangannya adalah :

Strategi 1 : Menjaga dan Memperbaiki Kualitas Ekosistem sumberdaya perikanan dan kelautan

Strategi 2 : Penegakan dan ketaatan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan;

Strategi 3 : Menghindari punahnya hewan langka yang ada di dalam daerah perlindungan dan sekitarnya.

Strategi 4 : Mengurangi Terjadinya Erosi Pantai dan Sungai

Strategi 5 : Mengurangi Dampak Erosi Daratan dan sedimentasi

Berdasarkan strategi utama dan strategi pengembangan, maka rencana kegiatan yang harus dilaksanakan pada setiap strategi pengembangannya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3. Strategi pengembangan, rencana kegiatan dan jangka waktu program pengelolaan wilayah pesisir dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan

No	Strategi Pengembangan	Rencana Kegiatan	Jangka Waktu Program		
			Pendek	Menengah	Panjang
1	Menjaga dan Memperbaiki Kualitas Ekosistem sumberdaya perikanan dan kelautan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan alat tangkap yang ramah lingkungan 2. Penegakan kembali terhadap penggunaan alat tangkap agar tidak menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. 3. Rehabilitasi ekosistem yang terdapat di wilayah pesisir seperti terumbu karang yang rusak guna menjaga fungsi-fungsi ekologis dari ekosistem tersebut. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan ekosistem wilayah pesisir termasuk kawasan konservasi untuk masa depan bersama. 5. Menyusun kebijakan/regulasi yang tegas seperti perda dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah perlindungan laut, wisata bahari, dan zona pemanfaatan lainnya 6. Melakukan sosialisasi peraturan Daerah Perlindungan Laut kepada masyarakat dalam desa dan luar desa 	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>-</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>-</p> <p>✓</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>✓</p> <p>-</p> <p>✓</p>

		<p>7. Menerapkan teknologi inderaja untuk monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>8. Melakukan pelatihan pengawasan berbasis masyarakat desa nelayan dalam pengelolaan kawasan konservasi laut dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan</p> <p>9. Penerapan sarana informasi dan komunikasi yang canggih dalam melakukan aktivitas pengelolaan</p> <p>10. Memberdayakan LSM dan Perguruan Tinggi Lokal sebagai fasilitator pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi</p>	✓	✓	✓
			✓	-	-
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
2	<p>Penegakan dan ketaatan hukum dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan;</p>	<p>1. Monitoring, pengawasan dan penegakan Aturan Daerah Perlindungan Laut dan wisata bahari serta zona lainnya.</p> <p>2. Melakukan pengawasan secara bergilir oleh anggota kelompok monitoring dan pengawasan.</p> <p>3. Melengkapi sarana pengawasan dan monitoring berupa teropong dan kapal pengawasan.</p> <p>4. Menegakkan peraturan Daerah Perlindungan Laut ,wisata bahari daerah pemanfaatan lainnya yang sudah ditetapkan.</p> <p>5. Menindak setiap pelaku yang melanggar Aturan Daerah Perlindungan Laut , wisata bahari serta zona pemanfaatan lainnya.</p>	✓	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓	-	-
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓

3	Menghindari punahnya hewan langka yang ada di dalam daerah perlindungan dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendidikan lingkungan hidup untuk masyarakat umum dan anak-anak tentang satwa yang dilindungi. 2. Membuat aturan penangkapan satwa yang dilindungi di desa. 	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">-</p>
4	Mengurangi Terjadinya Erosi Pantai dan Sungai	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mempertahankan garis pantai dari pengikisan air laut dan aliran sungai 2) Melakukan monitoring morfologi pantai di lokasi sekitar muara Sungai 3) Melakukan penghijauan pada daerah muara sungai. 4) Pembuatan tanggul bantaran sungai pada lokasi yang memerlukannya. 	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>
5	Mengurangi Dampak Erosi Daratan dan sedimentas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menginventarisir dan memanfaatkan lahan pertanian yang terlantar. 2) Pengadaan bibit untuk lahan perkebunan berupa kelapa dan tanaman produksi lainnya. 3) Mempertahankan kelestarian hutan di daerah resapan Air 4) Mengadakan penghijauan dengan jenis tanaman tertentu. 5) Membuat peraturan khusus untuk perlindungan hutan. 6) Pelatihan Agroforestry melalui program agroforestry. 7) Mencegah erosi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan banjir di wilayah pemukiman penduduk. 8) Membuat saluran air yang memadai. 	<p style="text-align: center;">✓</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">-</p>

Pembangunan dan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana

Pembangunan dan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat vital karena keberadaannya sangat menentukan keberhasilan pencapaian strategi–strategi pembangunan lainnya. Keteringgalan dan tidak majunya suatu daerah banyak disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung.

Strategi utama untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana pada kawasan KKLD adalah pembangunan dan pengembangan sarana/prasarana. Berdasarkan strategi utama tersebut maka strategi pengembangannya sebagai berikut : Peningkatan aksesibilitas, Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana dasar, Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana produksi. Sesuai dengan strategi pengembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 rencana kegiatannya.

Tabel 4. Strategi pengembangan dan rencana kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana/prasarana

No	Strategi Pengembangan	Rencana Kegiatan	Jangka Waktu Program		
			Pendek	Menengah	Panjang
1	Peningkatan aksesibilitas,	1) Perbaiki dan penambahan sarana dan prasana transportasi darat.	✓	✓	–
		2) Perbaiki dan penambahan sarana transportasi laut.	✓	✓	–
		3) Perbaiki dan penambahan ruas jalan menuju kawasan KKLD	✓	✓	–
		4) Pemeliharaan infrastruktur jalan	✓	✓	✓
2	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana dasar	1) Membangun, Menambah dan memperbaiki sarana listrik	✓	✓	–
		2) Menambah sarana komunikasi dan jaringan telepon	✓	–	–
		3) Menambah dan membangun sarana fasilitas air bersih bagi masyarakat	✓	✓	–
		4) Memperbaiki lingkungan dan membangun permukiman nelayan	✓	✓	–
		5) Mengembangkan fasilitas pembuangan sampah dan limbah masyarakat desa	✓	–	–
			✓	✓	–

		6) Membangun hotel/penginapan, restoran, fasilitas rekreasi untuk kegiatan pariwisata	✓	✓	-
		7) Membangun sarana/prasarana yang mendukung aspek pengawasan, penegakan hukum dan monitoring di kawasan KKLD	✓	✓	-
		8) Mendirikan lembaga pendidikan perikanan dan kelautan			
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana produksi	1) Penambahan alat tangkap ikan bagi nelayan	✓	✓	-
		2) Penambahan, perbaikan dan Peningkatan teknologi armada penangkapan ikan	✓	✓	-
		3) Pembuatan break water, jetty, dan green belt	✓	✓	-
		4) Pembangunan pabrik es skala kecil sekitar 20 ton	✓	-	-
		5) Program pengembangan TPI di desa nelayan	✓	✓	-

Penguatan dan pengembangan kelembagaan

Strategi utama kelembagaan adalah Penguatan dan pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di kawasan KKLD. Berdasarkan strategi utama maka dibangun berbagai strategi pengembangan seperti : peningkatan perhatian pemerintah daerah, peningkatan sosialisasi KKLD dan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan nelayan. Rencana kegiatan Penguatan dan pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di kawasan KKLD dapat dilihat pada Tabel 5 .

Tabel 5 . Strategi Penguatan dan pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di kawasan KKLD

No	Strategi Pengembangan	Rencana Kegiatan	Jangka Waktu Program		
			Pendek	Menengah	Panjang
1	Peningkatan perhatian	1) Mengembangkan peraturan-peraturan (Perda) maupun kebijakan-kebijakan	✓	✓	-

	pemerintah daerah KKLD	<p>pemerintah yang mendukung pengelolaan KKLD</p> <p>2) Penguatan institusi, aturan pengawasan dalam pengelolaan, pemanfaatan dan sumberdaya kelautan dan perikanan</p> <p>3) Membentuk unit organisasi pengelola KKLD berbasiskan kemitraan</p> <p>4) Menyusun dan menetapkan perda atau aturan-aturan lain dalam pengeloaan KKLD</p> <p>5) Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dalam proses pengelolaan kawasan konservasi perairan</p> <p>6) Meningkatkan dan mempertegas komitmen pemerintah daerah & masyarakat dalam pengelolaan KKLD</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
2	Peningkatan sosialisasi KKLD	<p>1) Meningkatkan sosialisai KKLD berupa daerah perlindungan laut dan kawasan wisata bahari serta zona pemanfaatan lainnya</p> <p>2) Mensosialisasikan aturan-aturan hukum positif yang bersifat nasional yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>
3	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan pengelolaan KKLD	<p>1) Mengidentifikasi aturan-aturan (hukum tak tertulis) pada level masyakat lokal yang dapat mendukung hukum-hukum positif dalam pengelolaan kawasan Konserasi</p> <p>2) Memperkuat dan mengembangkan kelembagaan-kelembagaan lokal di masyarakat nelayan yang mampu berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan seperti organisasi buruh nelayan maupun pembudidaya ikan</p> <p>3) Merevitalisasi lembaga-lembaga lokal/adat yang memiliki aturan-aturan lokal/kearifan lokal dan nilai-nilai lokal</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

		yang mampu diberdayakan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan			
		4) Membentuk lembaga monitoring dan pengawasan KKLD	✓	-	-

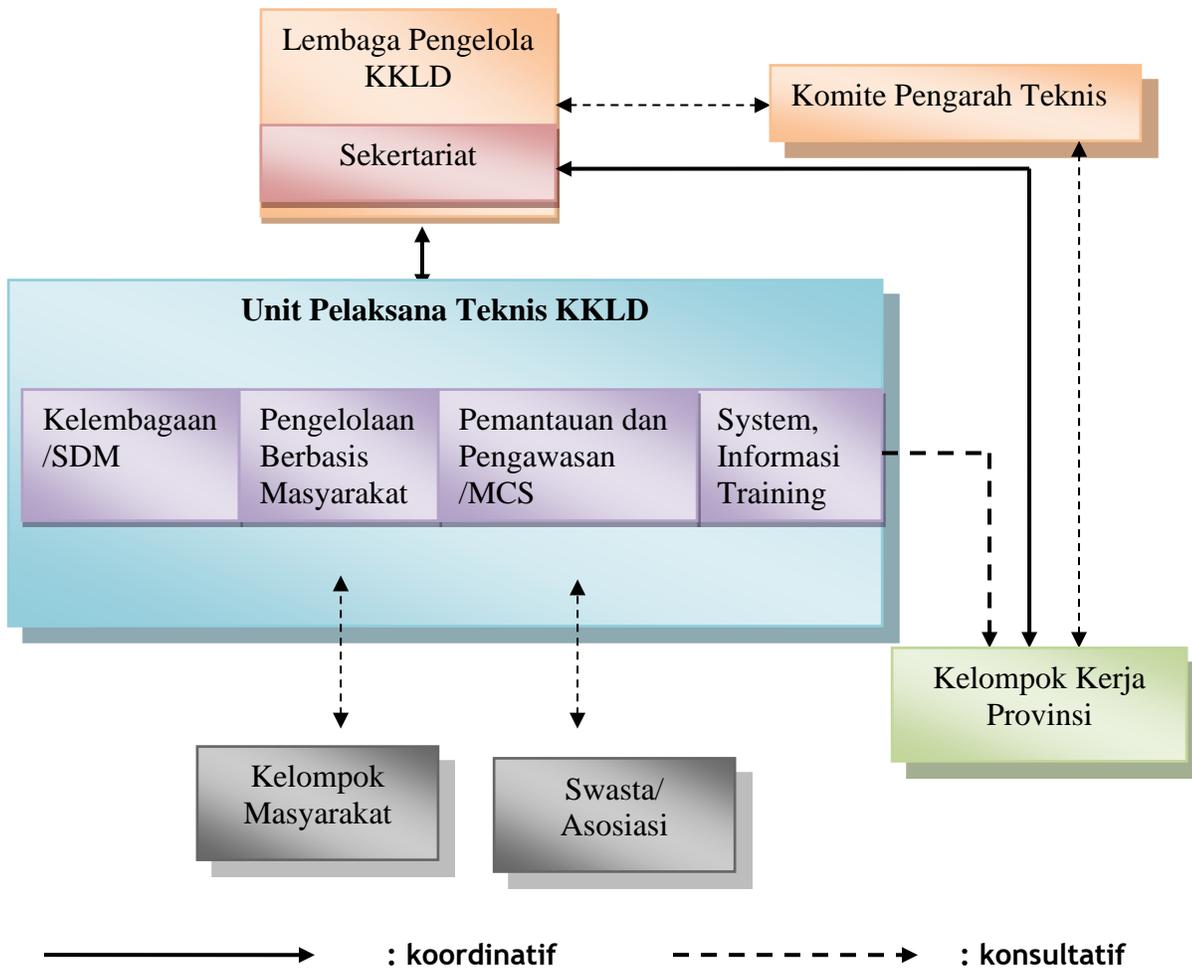
Tatanan Kelembagaan KKLD

Kelembagaan merupakan aspek penting yang menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan rencana pengelolaan. Untuk mencapai tujuan Program Pengelolaan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) sehingga dapat mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan yang lebih baik, maka diperlukan Kelembagaan Pengelolaan KKLD yang didukung oleh lembaga terkait yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan perikanan berkelanjutan. Keberadaan kelembagaan Program Pengelolaan KKLD diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan secara jangka panjang akan tetap berjalan. Keberadaan kelembagaan yang terpadu dan kuat akan menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Suatu kelembagaan yang kuat dan matang akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu dijabarkan pengorganisasian kelembagaan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan dengan jelas yang meliputi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait (Dinas teknis, pemerintah desa, lembaga pelaksana di desa, masyarakat, pihak swasta dan LSM) dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Baik pengelola maupun pelaksana pengelolaan KKLD dilapangan mempunyai wewenang hukum untuk terlibat langsung ataupun tak langsung dengan program pengelolaan KKLD.

Adapun prinsip-prinsip yang akan dikembangkan dalam Program Pengelolaan KKLD secara terpadu, adalah :

- 1) Transparan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan
- 2) Struktur organisasi yang efisien dengan pengawasan yang efektif dan dikelola secara profesional
- 3) Kejelasan tugas pokok fungsi dan tanggung jawab dari masing-masih unit pengelola program
- 4) Hasil Program Pengelolaan KKLD dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pengguna
- 5) Adanya kelengkapan peraturan dan menerapkan prinsip dan norma hukum dalam pengelolaan Program Pengelolaan KKLD
- 6) Dinamis untuk mengakomodasi perubahan untuk perbaikan Program Pengelolaan KKLD.

Secara ringkas dan jelas Bagan struktur pelaksana lembaga Pengelola KKLD dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2. Bagan struktur pelaksana lembaga Pengelola KKLD

Daftar Pustaka

- Baskoro, M.S., 1999. Capture Process of The Floated Bamboo Platform Liftnet With Light Attraction (Bagan). Doctoral Course of Marine Sciece and Technology, Tokyo University of Fisheries, Tokyo.
- Dahuri, R. J., Ginting, S.P., dan Sitepu, M.J., 1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 305 hal.
- Dahuri, R. 2000. Pembangunan Kawasan Pesisir dan Lautan. Tinjauan Aspek Ekologis dan Ekonomi. Jurnal Ekonomi Lingkungan. Edisi 12; hal. 13 – 33.
- Dahuri, R. 2003. *Paradigma baru pembangunan Indonesia berbasis kelautan*. Orasi ilmiah : Guru besar tetap bidang pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo . *Profil Peluang dan Investasi dan Usaha Sektor Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo*.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango 2010. *Profil desa Pesisir Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango 2014. *Profil Perikanan Kabupaten Bone Bolango*.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo 2005. *Pemantapan Penetapan Calon Kawasan Konservasi Laut Daerah dan Suaka Perikanan Desa Olele Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*.
- Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Gorontalo, 2015. Statistik Laporan Tahunan Perikanan Propinsi Gorontalo.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

GEDUNG BALITBANG KP. I. KOMPLEK BINA SAMUDRA
JALAN PASIR PUTIH NOMOR 1 ANCOL TIMUR JAKARTA 14430 TELEPON : (021) 64711583(LACAK)
FAXSIMIL.: (021) 64700924 LAMAN : <http://bbpse.litbang.kkp.go.id> POS ELEKTRONIK : ppsekp1@gmail.com

Nomor : 1154/BALITBANGKP.4/TU.330/IX/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Undangan dan Invited Paper**

27 September 2016

Kepada yth.
Ir. Yuniarti Koniyo
Universitas Negeri Gorontalo

Sebagai wadah dan apresiasi serta dalam rangka berbagi pengetahuan hasil penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PPSEKP) bekerjasama dengan Jaringan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (IMFISERN) akan menyelenggarakan kegiatan **Pengembangan Jejaring Pengetahuan (*Knowledge Center*) Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan Tahun 2016** yang akan dilakukan pada :

hari : Senin - Selasa
tanggal : 24 -25 Oktober 2016
waktu : 08.00 WIB- 16.00 WIB
tempat : Ruang Theater Blue Fin, Gedung Balitbang KP II
Jl. Pasir Putih 1 Ancol Timur

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Ibu untuk dapat mengirimkan makalah, hadir dan mempresentasikan makalah pada acara tersebut. Makalah dapat dikirimkan ke email semnassosekcp2016@gmail.com. Panitia menanggung biaya transportasi dan akomodasi pada tanggal 23 – 25 Oktober 2016 (3 hari 2 malam). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Heny (081584464094).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan**



Dr. Ir. Tukul Rameyo Adi

Lampiran Surat No. : 1154/BALITBANGKP.4/TU.330/IX/2016

JADWAL ACARA (TENTATIF)
Pengembangan Jejaring Pengetahuan (*Knowledge Center*) Sosial Ekonomi
Kelautan Dan Perikanan Tahun 2016

24 – 25 Oktober 2016

Waktu	Acara
Senin, 25 Oktober 2016	
08.00 – 08.25	Registrasi dan <i>coffee morning</i>
08.25 – 08.30	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
08.30 – 08.40	Laporan Kegiatan Acara Pengembangan Jejaring Pengetahuan (<i>Knowledge Center</i>) Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan Tahun 2016 <i>Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan</i>
08.40 – 08.50	Sambutan Presiden IMFISERN Periode 2014 – 2016 <i>Dr. Zuzy Anna</i>
08.50 – 09.10	Pembukaan & Arahan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
09.10 – 09.50	Presentasi Pembicara Utama Sesi 1 (Moderator : Dr. Luky Adrianto) <ul style="list-style-type: none">• Prof. Melda Karim Ariadno, LL.M, Ph.D (Universitas Indonesia)• M. Riza Damanik, PhD (Ahi Utama Bidang Kemaritiman, Kantor Staf Presiden)
09.50 – 10.35	Diskusi
10.35 – 11.15	Sesi 2 (Moderator : Dr. Arif Satria) <ul style="list-style-type: none">• Dr. Dedi S. Adhuri (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)• Prof. Dr. Sonny Koeshendrajana (Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)
11.15 – 12.00	Diskusi
13.00 – 14.30	Seminar – Sesi I
14.30 – 16.00	Seminar – Sesi II
Selasa, 26 Oktober 2016	
08.00 – 12.00	Pertemuan dalam rangka Pengembangan Jejaring Pengetahuan (<i>Knowledge Center</i>) Sosial Ekonomi KP Tahun 2016
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 16.00	KONGRES IMFISERN VIII 2016

LEMBAR KONFIRMASI KEHADIRAN
Pengembangan Jejaring Pengetahuan (*Knowledge Center*) Sosial Ekonomi
Kelautan Dan Perikanan Tahun 2016
24 – 25 Oktober 2016

Nama Lengkap :

Institusi :

No. Telp :

Email :

Judul Makalah :

.....

.....

.....

Sub Tema : **A. Regulasi, Kebijakan dan Hukum Kelautan dan Perikanan**

(pilih salah satu) **B. Pemasaran, Perdagangan, Usaha dan Investasi**

C. Sosiologi, Antropologi dan Kelembagaan

D. Ekonomi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Catatan : Lembar Konfirmasi Kehadiran mohon dikirimkan ke pada Panitia paling lambat tanggal 11 Oktober 2016. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Heny (081584464094).

**PENGEMBANGAN JEJARING PENGETAHUAN (*Knowledge Center*)
SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016**



**PUSAT PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2016**

Pendahuluan

Hasil penelitian ilmiah sosial ekonomi kelautan dan perikanan merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam pengambilan kebijakan terkait isu strategis tertentu. Pelaksanaan penelitian dilakukan oleh berbagai lembaga mulai pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), swasta hingga masyarakat. Berbagai hasil penelitian dibidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang telah dihasilkan masih tersebar pada masing-masing lembaga, belum terintegrasi dan terkomunikasikan antar lembaga.

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PPSEKP) sejak tahun 2015 mulai membangun jejaring pengetahuan dalam bentuk '*Knowledge Center (KC)*'. KC merupakan wadah untuk berbagi pengetahuan khususnya di bidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan antara PPSEKP dengan perguruan tinggi maupun lembaga penelitian lain. Pada tahun 2015 telah diselenggarakan workshop pertama KC dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah jejaring pengetahuan PPSEKP mencapai 17 perguruan tinggi yang memiliki jurusan sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia.
2. Kesepakatan tukar menukar (*sharing*) pengetahuan hasil penelitian pada masing-masing institusi melalui KMS.
3. Kerjasama tidak hanya berbagi pengetahuan tetapi juga dalam hal penelitian, diseminasi hasil, penguatan kapasitas SDM dan publikasi.

Pengembangan jejaring pengetahuan pada tahun 2016 akan dilakukan melalui kegiatan Seminar Nasional Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Semnas Sosek KP) dan Kongres IMFISERN VIII. Rekomendasi dari hasil pertemuan diharapkan dapat menjawab isu-isu strategis sektor Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan

1. Nama Kegiatan

1. Pengembangan Jejaring Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan;
2. Seminar Nasional Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 (Seminar Nasional Sosek KP 2016)

2. Mekanisme Kegiatan

Mekanisme kegiatan dalam Pengembangan Jejaring Pengetahuan (*Knowledge Center*) Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan terdiri dari 3 bagian yaitu :

- (1) *Plenary Session* yang menampilkan beberapa pembicara kunci dari komunitas akademik yang terkait dengan penelitian dan isu strategis sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
- (2) *Paralel Session* yang berisikan pemaparan hasil penelitian sosial ekonomi oleh peneliti, praktisi, akademisi dan pemerhati sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang terbagi dalam 4 sub-tema, yaitu:
 - a. **Regulasi, Kebijakan dan Hukum Kelautan dan Perikanan** yang akan memfasilitasi paparan dan makalah tentang perijinan, hambatan tarif & non tarif, analisis kebijakan, kajian hukum, politik perijinan.
 - b. **Pemasaran, Perdagangan, Usaha dan Investasi** yang akan memfasilitasi paparan dan makalah tentang investasi, pemasaran, perdagangan, sistem logistik, ekonomi usaha, ekonomi RT, pendapatan, analisis makro & mikro
 - c. **Sosiologi, Antropologi dan Kelembagaan** yang akan memfasilitasi paparan dan makalah tentang kearifan lokal, perubahan sosial, kelembagaan sosial, kelembagaan ekonomi, kelembagaan diseminasi, isu pendidikan kebaharian, etos kerja, gender, kelembagaan, posisi politik komunitas bahari, pemberdayaan, preferensi dalam budaya bahari
 - d. **Ekonomi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan** yang akan memfasilitasi paparan dan makalah tentang IUU, Destructive fishing, Valuasi, kelembagaan pengelolaan, reklamasi, tata kelola, konservasi, perubahan iklim.
- (3) *Network session*, sebuah media penguatan jejaring pengetahuan (*Knowledge Center*) sebagai upaya untuk mengelola pengetahuan sosek KP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat.

3. Waktu dan Tempat

Pengembangan Jejaring Pengetahuan Sosial Ekonomi KP akan diadakan pada :

Waktu : Senin-Selasa, 24-25 Oktober 2016;

Jam : 08.00 – 17.00 WIB

Tempat : Gedung Balitbang KP

Jl. Pasir Putih I Ancol Timur

4. Peserta

Peserta Pengembangan Jejaring Pengetahuan Sosial Ekonomi KP adalah para peneliti, praktisi, akademisi, pelaku usaha dan pemerhati sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Jadwal Kegiatan

No.	Tahapan	Tanggal batas akhir
1.	Pengiriman Intisari/Abstrak	17 Oktober 2016
2.	Pengumpulan Makalah Lengkap	20 Oktober 2016
3.	Pelaksanaan Pengembangan Jejaring KC 2016	24-25 Oktober 2016

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

SEKRETARIAT PANITIA :

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

Gedung Balitbang KP I Lt. 4, Komplek Bina Samudera

Jl. Pasir Putih I Ancol Timur Jakarta Utara 14430

Telp/Fax : (021) 64700924

Email: semnassosekcp2016@gmail.com

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA:

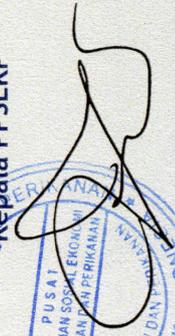
YUNIARTI KONIYO

SEBAGAI:

PEMAKALAH

PENGEMBANGAN JEJARING PENGETAHUAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jakarta, 24-25 Oktober 2016

Kepala PPSEKP

 Dr. Tukul Rameyo Adi, MT



Presiden IMFISERN

 Dr. Zuzy Anna



Kepala P2KK-LIPI

 Dr. Sri Sunarti Purwaningsih



Pusat Penelitian Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan



Indonesian Marine and Fisheries
Socio-Economics Research Network



Pusat Penelitian Kemasyarakatan
dan Kebudayaan-LIPI